

KEBIJAKAN TAKTIS PEMERINTAH DAERAH DI PULAU JAWA DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DESIASE* (COVID)-19

Joko Pramono¹, Farco Siswiyanto Raharjo¹
Universitas Slamet Riyadi Surakarta
masjepe69@gmail.com

Abstract. *Local governments are the elements most responsible in their regions in handling Covid-19. Regional heads are required to make technical decisions which do not conflict with central government regulations. In handling Covid 19, each regional head was given the authority to carry out tactical policies. This is to suppress the spread of Covid 19 which is increasing day by day. This research method uses content analysis. Content analysis was carried out in a descriptive qualitative manner. The DKI Jakarta Government has implemented Large-Scale Social Restrictions (PSBB) to reduce the spread of Covid 19. West Java Province, establishes good communication and coordination with the central government. Then West Java has done quite well based on epidemiological indicators. So that it gets the best Covid 19 handling award in Indonesia. The Central Java provincial government in dealing with covid-19 puts forward preventive or preventive aspects. This condition can be seen from the community safari carried out by the governor of Central Java in order to provide socialization on the handling of Covid-19. East Java Province applies a cross-sectoral policy strategy. This policy involves several parties, including universities. From some of the cases above, it can be concluded that technical policy steps and fast action actions can be taken by the governments of each region on the island of Java in preventing the spread of the Covid-19 virus are correct.*

Keywords: *technical policy, local government.*

Abstrak. Pemerintah daerah menjadi unsur yang paling bertanggung jawab diwilayahnya dalam penanganan covid-19. Kepala daerah diharuskan membuat keputusan teknis yang mana tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Pada penanganan *Covid 19*, setiap kepala daerah di berikan kewenangan untuk melakukan kebijakan taktis. Hal ini untuk menekan angka persebaran *covid 19* yang semakin meningkat dari hari ke hari. Metode penelitian ini menggunakan content analysis. Analisis isi dilakukan secara deskriptif kualitatif. Pemerintah DKI Jakarta melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan angka persebaran *Covid 19*. Provinsi Jawa Barat ,menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik kepada pemerintah pusat. Kemudian Jawa Barat telah bertindak cukup baik berdasarkan indikator epidemiologi. Sehingga mendapat penghargaan penanganan *Covid 19* terbaik di Indonesia. Pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam menangani covid-19 mengedepankan aspek preventif atau pencegahan. Kondisi ini bisa di lihat dari safari masyarakat yang di lakukan oleh gubernur Jawa Tengah dalam rangka memberikan sosialisasi penanganan covid-19. Provinsi Jawa Timur menerapkan strategi kebijakan lintas sektoral. Kebijakan ini melibatkan beberapa pihak, termasuk didalamnya adalah kalangan perguruan tinggi. Dari beberapa kasus

diatas dapat diambil kesimpulan bahwa langkah- langkah kebijakan teknis dan aksi gerak cepat dapat dilakukan oleh pemerintah masing- masing daerah di pulau Jawa dalam mencegah penyebaran virus covid-19 sudah tepat.

Kata Kunci : kebijakan teknis, pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Awal tahun 2020 Indonesia dikejutkan oleh terpaparnya corona virus pada warga negara asing yang sempat singgah dipulau Bali. Tercatatnya kasus tersebut mengalami peningkatan yang dari hari ke hari hingga saat ini. Kita ketahui bahwa *covid-19* telah ditetapkan pandemi secara internasional oleh *World Health Organization (WHO)*, termasuk Indonesia. Corona virus memiliki ukuran 125 nanometer atau 0,125 mikrometer. Satu mikrometer setara dengan 1000 nanometer. Sehingga virus ini tidak kasat oleh mata. WHO menyebut bahwa virus ini dapat bertahan rata-rata 10 menit dipermukaan termasuk tangan. Kemudian dapat bertahan selama beberapa jam dalam suhu 24-27 derajat Celsius.

Pandemi bencana non alam sudah pernah terjadi di dunia ini sebelumnya. Sebagai contoh antara lain : *Ebola, SARS, H5NI, HIV, AIDS*, dan lain-lain. *Covid-19* memiliki implikasi pada berbagai bidang mulai dari sektor ekonomi hingga politik. Pidato presiden dalam rapat paripurna kabinet yang dirilis berbagai media massa mengatakan bahwa ekonomi dunia tertekan minus enam sampai tujuh persen. Perlu adanya langkah kongkrit dalam penanganan *covid-19* sebagai *extraordinary case*.

Berbagai negara di dunia menerapkan strategi kebijakan teknis. Diantaranya adalah menerapkan *lockdown*. Secara umum diartikan sebagai pemberhentian secara total aktivitas masyarakat pada negara tersebut. Penerapan *lockdown* dilakukan oleh beberapa negara seperti India dan Malaysia. Negara Indonesia tidak menjadikan *lockdown* sebagai kebijakan teknis untuk menangani *Covid-19*. Kebijakan teknis yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Secara terminologi tidak ada definisi baku istilah *lockdown* dan pembatasan sosial berskala besar. Namun secara pembedaan dapat di lihat bahwa *lockdown* lebih ketat dari pembatasan sosial berskala besar. Kegiatan pembatasan sosial berskala besar dikecualikan

untuk beberapa sektor strategis seperti pelaku industri sektor pangan, perbankan, industri manufaktur, pertambangan, hingga pelayanan pajak.

Tercatat data pada saat ini, kasus positif *covid-19* mengalami peningkatan lebih dari 1500 jiwa setiap harinya. Kondisi ini menjadikan Indonesia menempati peringkat pertama di ASEAN sebagai negara yang memiliki jumlah kasus paling tinggi *covid-19*. Hal ini membuat pemerintah melakukan tindakan taktis untuk menekan jumlah kasus positif *covid-19*. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat tim kerja gugus tugas dari tingkat pemerintah pusat hingga tingkat pemerintah daerah. Ketua gugus tugas *covid 19* dipimpin langsung oleh kepala BNPB yaitu Letjen. Doni Monardo. Komunikasi intensif senantiasa dilakukan secara terukur setiap hari. Berbagai persiapan medis dan non medis dilakukan untuk menangani pasien. Kemudian bantuan sosial berbentuk uang tunai maupun sembako disalurkan dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak. Meskipun dalam pelaksanaan menuai persoalan teknis, yakni penyaluran bantuan yang tidak terdistribusi pada sasaran.

Pemerintah daerah menjadi unsur yang paling bertanggung jawab diwilayahnya dalam penanganan *covid-19*. Kepala daerah diharuskan membuat keputusan teknis yang mana tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Hal ini menjadi sebuah persoalan di tingkat pemerintah daerah. Terdapat kepala daerah yang membuat kebijakan teknis yang tidak sesuai dengan peraturan pusat. Sebagai contoh pemerintah kabupaten Tegal yang sempat melakukan tindakan *local lockdown* tanpa persetujuan pemerintah pusat. Kebijakan teknis ini menuai persoalan. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten tegal tersebut dari perspektif keilmuan kebijakan publik dinamakan sebagai diskresi kebijakan. Diskresi kebijakan lazim dilakukan jika keadaan darurat sehingga harus mengambil keputusan taktis. Setiap kepala daerah telah melakukan berbagai kebijakan teknis dalam rangka menangani *covid-19*. Kewenangan kepada pemerintah daerah sebaiknya diberikan secara lebih. Hal ini di karenakan pemerintah daerah lebih memahami kondisi yang ada di daerah. Sehingga upaya taktis dapat di lakukan dengan maksimal. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai kebijakan teknis kepala daerah yang ada di pulau jawa dalam rangka menangani wabah pandemi *covid-19*.

METODE PENELITIAN.

Metode penelitian ini menggunakan *content analysis*, yakni membahas secara mendalam suatu informasi yang tertulis atau tertayang di media massa. Analisis isi dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa secara deskripsi melalui narasi kata. Pendekatan ini dilakukan dengan deskripsi narasi terfokus pada situasi yang sedang berkembang, kondisi / *setting*, gaya, gambar, makna, serta gagasan penting agar dikenali/dipahami secara kompleks. (Krippendorff, 2004: 17).

PEMBAHASAN

Studi kebijakan publik terkait dengan studi ilmu politik. Namun studi kebijakan publik lebih mengarah pada ilmu administrasi negara. Didalamnya terfokus pada proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Proses kebijakan publik dimulai dari tahap perumusan atau formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring kebijakan hingga evaluasi kebijakan.

Thomas Dye mendeskripsikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (Howlett, 1995). William Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah keputusan dari berbagai aktor yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut W.N.Dunn (2003) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah list pilihan suatu tindakan yang saling terhubung yang disusun oleh sebuah instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam sebuah bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan sebuah pembangunan perkotaan. Tindakan-tindakan kebijakan publik tersebut merupakan implementasi kebijakan dan dibutuhkan budaya organisasi yang akan signifikan berpengaruh pada layanan publik, misalnya layanan kesehatan (Darmi, Titi. 2018).

Perumusan kebijakan publik berangkat dari masalah publik. Masalah diartikan sebagai suatu keadaan yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang kemudian mengharapkan adanya sebuah perbaikan. Suatu masalah akan menjadi masalah public bila ada orang atau

kelompok yang menggerakkan kearah tindakan guna mengatasi masalah tersebut.

Menurut Tangkilisan (2003:2) kebijakan publik bisa dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni: 1) Kebijakan publik makro, sifatnya umum atau dapat disebut dengan kebijakan yang mendasar. Sebagai contoh : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan presiden, Peraturan daerah. Kebijakan ini biasanya langsung bisa di implementasikan; 2) Kebijakan publik meso, artinya memiliki sifat menengah atau yang sering disebut penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dalam bentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Wali Kota, Keputusan bersama atau SKB antar menteri, Gubernur dan Bupati atau wali kota; 3) Kebijakan publik mikro, artinya mengatur jalannya atau implementasi dari kebijakan publik di atasnya. Bentuk kebijakan ini seperti peraturan yang dibuat oleh aparat-aparat publik tertentu yang kedudukannya dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Misalkan peraturan dinas dan sejenisnya.

Dalam penanganan kasus *Covid-19* masuk dalam domain kebijakan publik makro. Peraturan pada pemerintah tingkat pusat menjadi acuan. Kemudian diperjelas dengan peraturan dibawahnya. Seyogyanya peraturan dibawah harus berkesinambungan dengan peraturan yang ada pada pemerintah pusat.

James Anderson dikutip Suharno (2010:24-25) mengatakan bahwa kebijakan publik terdiri atas beberapa hal sebagai berikut:

- Kebijakan substansif versus kebijakan prosedural
- Kebijakan distributif versus kebijakan reulatori versus kebijakan redistributif
- Kebijakan material versus kebijakan simbolik
- Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang privat (privat goods)

Secara etimologis pemerintahan berasal dari kata dasar perintah yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Penambahan awalan pe menjadi

pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Penambahan akhiran an menjadi pemerintahan berarti perbuatan, cara, hal atau urusan daripada badan yang memerintah tersebut (Inu Kencana Syafe'i, 2006).

Menurut gramatikal bahasa Inggris definisi pemerintahan dan pemerintah tidak memiliki perbedaan. Istilah keduanya disebut dengan "government". Kata ini bersumber dari bahasa latin yakni "gubernauculum" yang berarti kemudi. Kata government dapat bermakna :

1. Melaksanakan wewenang pemerintahan.
2. Cara atau sistem memerintah.
3. Fungsi atau kekuasaan untuk memerintah.
4. Wilayah atau negara yang diperintah.
5. Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu Negara.

Ermaya Suradinata (2007) memberikan definisi perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah ialah suatu badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Kemudian Taliziduhu Ndraha (2003) membedakan definisi keduanya yakni, Pemerintah" adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional, sedangkan "Pemerintahan" adalah perbuatan atau tindakan memerintah.

Menyimak pendapat di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa istilah "Pemerintah" berkaitan erat dengan makna kelembagaan atau institusi-institusi negara atau merupakan badan-badan publik yang berfungsi untuk melakukan upaya pencapaian tujuan negara. Sedangkan makna "Pemerintahan" merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh lembaga publik tersebut.

Penulis berupaya mengumpulkan data dari rilis media elektronik yang berkembang selama masa pandemi *covid-19*. Dalam pemberitaan tersebut melihat upaya pemerintah daerah dipulau jawa dalam penanganan kasus *covid-19*. Mengingat jawa memiliki jumlah masyarakat terpapar dengan jumlah terbesar di Indonesia.

Presiden Joko Widodo mengumumkan langkah – langkah pengendalian penyebaran *covid-19* yang dinilai ahli kesehatan lambat, ketika itu Jokowi memerintahkan kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota menetapkan situasi penyebaran Covid-19 di wilayahnya dengan berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pernyataan presiden tersebut dan kemudian menyusul pada penetapan Indonesia dalam status bencana nasional non alam *covid-19* yang meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir kemudian. Langkah-langkah yang diinstruksikan adalah agar proses belajar dan bekerja dapat dilakukan di rumah, dan juga menganjurkan untuk menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang serta melakukan pengetesan infeksi *covid-19* dan pengobatan secara maksimal. (BBC News Indonesia, 16 Maret 2020).

Analisis dari data pemberitaan tersebut ialah muncul sebuah perbedaan informasi antara pusat dan daerah. Sebelum ada himbauan yang terpusat dari pemerintah pusat dalam hal ini presiden. Terdapat beberapa kepala daerah sebelumnya telah melakukan langkah-langkah teknis. Gerak pemerintah daerah dalam inisiatif pengendalian *covid-19* telah dilakukan diantaranya Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Solo, Pemprov Jawa Tengah dan dan Pemprov Jawa Barat. Dalam perspektif kebijakan publik dikenal dengan istilah diskresi kebijakan. Tindakan ini tidak dapat disalahkan, karena pemerintah daerah lebih mengerti dan memahami kondisi yang ada di daerahnya. Sehingga perlu pengambilan keputusan yang cepat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *covid-19*.

Kebijakan Teknis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Penanganan Covid-19.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta sempat menjadi salah satu daerah dengan angka *covid-19* tertinggi di Indonesia. Pemerintah DKI Jakarta melalui instruksi Gubernur Anies Baswedan melakukan berbagai macam tindakan teknis. Kebijakan ini diambil sebagai upaya menekan angka pasien positif *covid-19*. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah taktis yang dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Kebijakan tersebut antara lain :

1. Pembatasan akses keluar masuk kawasan Jakarta dan luar Jakarta.
2. Penerapan peribadahan di rumah untuk masyarakat.

3. Tidak ada aktivitas mudik lebaran.
4. Penyediaan akses tempat cuci tangan.
5. Pengadaan fasilitas karantina wilayah kelurahan.
6. Sosialisasi kepada warga masyarakat dilakukan oleh setiap perangkat wilayah.
7. Tidak di bolehkan aktivitas kerumunan massa.
8. Pemberlakuan jaga jarak dan meminimalisir aktivitas diluar rumah.
9. Meliburkan sekolah dan mengganti dengan kegiatan belajar secara online.

(Sumber berita : Kata data, 20 Maret 2020 dan liputan 6 News, 15 Maret 2020).

Analisis data dari pemberitaan tersebut dapat di lihat bahwa pemerintah DKI Jakarta melaksanakan berbagai kebijakan teknis sebagai upaya penanganan *covid-19*. Namun angka positif *covid-19* di DKI Jakarta tetap dalam kategori besar. Hal ini disebabkan jumlah mobilitas warga DKI Jakarta tetap berlangsung setiap hari. Selain itu tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan beragam. Perlu sebuah tindakan kongkrit dengan melibatkan aparat sebagai langkah membubarkan aktivitas yang terkait dengan kerumunan masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penanganan Covid-19.

Provinsi Jawa Barat di nilai sebagai salah satu provinsi terbaik dalam penanganan *covid-19*. Gugus tugas penanganan *covid-19* yang kemudian diganti nama dengan Tim Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi mengatakan bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat ,menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik kepada pemerintah pusat. Kemudian Jawa Barat telah bertindak cukup baik berdasarkan indikator epidemiologi.

Meskipun jumlah pasien positif meningkat setiap waktu, namun jumlah pasien sembuh juga meningkat secara signifikan. Pemerintah provinsi Jawa Barat jugs menyediakan data secara lengkap dengan basis aplikasi. (Sumber : CNN Indonesia, 20 Mei 2020).

Analisis data dari informasi diatas menjelaskan bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat melaksanakan kebijakan teknis dengan orientasi pada inovasi. Sebagai contoh penampilan data pasien *covid-19* berbasis aplikasi. Meskipun penanganan *covid-19* bukanlah ajang sebuah perlombaan, akan tetapi

pencapaian pemerintah daerah dalam menangani pandemi ini selayaknya mendapatkan sebuah *reward* atau apresiasi.

Kebijakan Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah telah menerbitkan surat edaran sejak tanggal 14 Maret 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan *covid-19*. Surat edaran ditujukan pada walikota dan bupati, jajaran institusi pemerintahan dan pendidikan, hingga BUMN yang ada diwilayah provinsi Jawa Tengah.

Surat edaran tersebut mengintruksikan untuk melakukan pencegahan sedini mungkin persebaran *Covid-19* dan penyediaan peralatan yang diperlukan seperti alat ukur suhu tubuh, masker, hand sanitizer, hingga penyediaan tempat cuci tangan diberbagai wilayah.

Kemudian gubernur Jawa Tengah juga mengintruksikan untuk meniadakan aktivitas yang melibatkan banyak orang seperti *Car Free Day*, kemah, study tour dan aktivitas lainnya berkaitan dengan kerumunan massa.

Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah memberi pemahaman langsung secara door to door dalam penanganan COVID-19. Bahkan dalam satu bulan ini, Ganjar intens keliling Kota Semarang dengan bersepeda untuk menemui masyarakat. Ganjar bahkan tak segan menggunakan pengeras suara untuk mengingatkan agar warga mau memakai masker dan jaga jarak. (Sumber : Okezone News, 1 April 2020).

Analisis kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam menangani *covid-19* mengedepankan aspek preventif atau pencegahan. Kondisi ini bisa di lihat dari safari masyarakat yang di lakukan oleh gubernur Jawa Tengah dalam rangka memberikan sosialisasi penanganan *covid-19*. Gubernur Jawa Tengah langsung menysasar pada masyarakat untuk mengetahui keadaan yang terjadi. Dalam bidang ilmu kebijakan publik di kenal dengan istilah monitoring kebijakan.

Kebijakan Teknis Penanganan *Covid-19* Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Berbagai upaya terus pemerintah provinsi Jawa Timur lakukan untuk mempercepat penanganan virus *covid-19*. Salah satu upaya yang dilakukan

dengan menerapkan kerjasama pentahelix dengan berbagai elemen strategis di Jawa Timur. Pentahelix ini merupakan kerja sama antar lini di masyarakat. Perguruan tinggi dan akademisi menjadi salah satu elemen pentahelix yang bisa diajak kerjasama untuk menangani *covid-19*.

Sebagai wujud penerapannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Ketua Gugus Tugas Pusat Doni Monardo melakukan video conference dengan 58 Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS) se-Jatim. Video conference dilakukan di Gedung Negara Graha di Surabaya. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengharapkan kerja sama pentahelix dengan keterlibatan PTN/PTS se-Jatim bisa membantu percepatan penanganan Covid-19 di Jatim. Sinergitas semacam ini menjadi bagian penting untuk bersama-sama melawan Covid-19. (Sumber : Kontan.id , 8 Juli 2020).

Kasus infeksi Covid-19 di Surabaya Raya mencapai 7.472 kasus per Sabtu (27/6/2020). Rinciannya ada 5.414 kasus di Surabaya, 1.453 kasus di Sidoarjo dan 605 kasus di Gresik. Dari kasus yang ada di Surabaya, 2.118 orang sembuh, 400 orang meninggal dan 49 pending (dalam validasi data). Sementara di Sidoarjo sebanyak 225 orang sembuh, 109 meninggal dan 5 orang pending. Kesembuhan di Gresik dilaporkan 80 orang sembuh, 61 orang meninggal dan 17 pending. Presiden Joko Widodo dalam kunjungan ke Jawa Timur meminta kasus di provinsi dengan 38 kabupaten/kota ini ditekan. Terutama wilayah Surabaya Raya sebagai daerah dengan kasus terbanyak. (Sumber : Bisnis.com)

Analisis kebijakan teknis penanganan *covid-19* di pemerintah provinsi Jawa Timur menerapkan strategi kebijakan lintas sektoral. Kebijakan ini melibatkan beberapa pihak, termasuk didalamnya adalah kalangan perguruan tinggi. Kerjasama lintas sektoral ini diharapkan mampu menekan angka penularan *covid-19* di wilayah provinsi Jawa Timur. Seperti yang di ketahui bersama bahwa provinsi Jawa Timur saat ini mencatat angka terbesar kasus *covid-19*.

Analisis Kebijakan Teknis Kepala Daerah di Pulau Jawa dalam Penanganan Covid-19.

Setiap kepala daerah memiliki ciri khas masing – masing dalam penanganan pandemi *covid-19*. Sebagian besar kepala daerah di pulau Jawa mengambil kebijakan lebih awal sebelum adanya intruksi dari presiden. Kemudian beberapa kepala daerah melakukan diskresi kebijakan dalam mengambil tindakan sebagai upaya teknis penanganan *covid -19*. Diskresi kebijakan dilakukan kepala daerah karena pemerintah pusat terlihat lamban dalam memberikan intruksi. Kepala daerah telah melakukan berbagai tindakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat untuk mencegah penularan *covid 19*.

Gubernur Jawa Barat misalnya, menggunakan kebijakan yang bersifat koersif lebih dominan dibandingkan dengan lainnya. Kebijakan yang dilakukan adalah berupa instruksi meniadakan social distancing dengan menutup *car free day*, meliburkan sekolah di wilayahnya dan juga melakukan teknik *Canalizing*, menggandeng rumah sakit dan universitas untuk bekerjasama dalam menangani pencegahan penularan Covid-19 di wilayah Jawa Barat dan juga melakukan pemeriksaan proaktif dan membangun pusat informasi yang bisa diakses oleh warga terkait informasi dan edukasi mengenai pencegahan penularan virus Covid-19. Penetapan status siaga satu untuk wilayah Jawa Barat.

Kemudian juga hal yang sama dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Melakukan pembatasan sosial / *social distancing* ,meliburkan sekolah dan universitas, membatalkan event skala besar yang sudah terencana, peniadaan *car free day*. Koordinasi hingga jajaran lurah dan camat untuk mensosialisasikan penyebaran/pandemi dan pencegahan *covid-19*.

Gubernur Jawa Tengah lebih melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat dalam rangka mensosialisasikan pencegahan *covid-19*. Ganjar Pranowo selaku Gubernur sering keliling ditengah masyarakat dengan tujuan memantau perkembangan. Kemudian membentuk satuan koordinator tugas dalam penangan wabah *covid 19*. Sebagai kebijakan teknis gubernur Jawa Tengah menerbitkan surat edaran yang di tujukan kepada seluruh jajaran pemerintah, institusi pendidikan, pelaku usaha, hingga BUMN yang ada di jawa tengah.

Provinsi Jawa Timur mencatat angka tertinggi kasus penyebaran *Covid-19*. Sebagai upaya menangani hal tersebut, pemerintah provinsi Jawa Timur melakukan kerjasama lintas sektoral, termasuk didalamnya adalah kalangan perguruan tinggi hingga institusi kesehatan. Kerjasama lintas sektoral ini bertujuan untuk menangani persebaran *covid-19*. Langkah Provinsi Jawa Timur lebih banyak menggunakan strategi koersif, berupa instruksi dan sosialisasi. Ini berarti strategi komunikasi dilakukan telah juga berupa teknik informatif dan edukatif Strategi canalizing juga menjadi dominan agar pesan dalam pencegahan penularan *covid-19* dapat bersama-sama dilakukan Khususnya di wilayah provinsi Jawa Timur.

PENUTUP

Dari beberapa kasus di atas dapat diambil kesimpulan bahwa langkah-langkah kebijakan teknis dan aksi gerak cepat dapat dilakukan oleh pemerintah masing- masing daerah di pulau Jawa dalam mencegah penyebaran *virus covid-19* sudah tepat, namun lambannya intruksi pemerintah pusat dalam mengambil komando sangat disayangkan. Peran pemerintah pusat saat ini seolah-olah hanya melakukan beberapa strategi komunikasi saja dan tidak komprehensif, berupa teknik koersif yang masih berupa instruksi tanpa tindakan sanksi dan juga informatif kepada pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Darmi, Titi (2018). Layanan Pembuatan IMB Berbasis Implementasi Kebijakan dan Budaya Organisasi. *Jurnal Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*. Vol 6 Nomor 1, pp 1-14.
- Ermaya Suradinata, 2007, *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah*, Jakarta, Gramedia Pustaka. Utama.
- Kencana, Syafii Inu. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis : an introduction to its methodology*. New. York : Sage Publication.
- Michael Howlett, Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford University Press. Toronto.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Jakarta. Rineka Cipta.

Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman. Offset YPAPI.